

NYANYIAN PARA PENYINTAS: PADUAN SUARA DIALITA DAN POLITIK INGATAN GENOSIDA 1965 DI INDONESIA

Aris Setyawan

Magister Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Email: aris@arissetyawan.com

Penerimaan artikel
06 Juni 2025

Review Artikel
Peer I
04 Desember 2025
Peer II
04 Desember 2025

Revisi Artikel
28 Desember 2025

Publikasi Artikel
31 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Paduan Suara Dialita, sebuah kelompok paduan suara yang terdiri dari para perempuan penyintas Genosida 1965 di Indonesia, sebagai subjek subaltern yang menyuarakan pengalaman dan trauma mereka melalui musik. Dengan menggunakan teori subaltern Gayatri Chakravorty Spivak, tulisan ini menganalisis bagaimana Dialita memproduksi wacana tandingan terhadap narasi sejarah dominan yang direpresi oleh negara. Terbentuk dari komunitas para eks-tahanan politik (tapol) yang mengalami diskriminasi, Dialita bertransformasi menjadi sebuah gerakan budaya yang menyuarakan tuntutan keadilan dan pengusutan tuntas pelanggaran HAM berat 1965. Melalui album seperti *Dunia Milik Kita* (2016) dan *Salam Harapan* (2019), serta kolaborasi dengan musisi muda, mereka berhasil menjangkau generasi muda dan menyebarkan kesadaran akan tragedi kemanusiaan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Dialita sebagai kelompok subaltern mampu "berbicara" dan menghasilkan karya yang signifikan, suara mereka belum sepenuhnya "didengar" oleh negara, yang hingga kini belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus Genosida 1965. Dengan demikian, karya Dialita menjadi sebuah pengingat akan pentingnya mendengarkan suara korban untuk mencapai rekonsiliasi dan keadilan sejarah.
Kata Kunci: Paduan Suara Dialita, Subaltern, Pascakolonial, Genosida 1965, Memori Kolektif, Musik sebagai Perlawanan, Hak Asasi Manusia, Gayatri Spivak.

Abstract

This research examines the role of the Dialita Choir, a choir group composed of women survivors of the 1965 Genocide in Indonesia, as a subaltern subject articulating their experiences and trauma through music. Employing Gayatri Chakravorty Spivak's theory of the subaltern, this paper analyzes how Dialita produces a counter-discourse to the dominant historical narrative repressed by the state. Formed from a community of former political prisoners (*tapol*) who faced discrimination, Dialita transformed into a cultural movement voicing demands for justice and a thorough investigation of the 1965 gross human rights violations. Through albums such as *Dunia Milik Kita* (2016) and *Salam Harapan* (2019), and collaborations with young musicians, they have successfully reached a younger generation and spread awareness of this humanitarian tragedy. This study demonstrates that although Dialita as a subaltern group can "speak" and produce significant work, their voices have not been fully "heard" by the state, which to this day has not shown seriousness in resolving the 1965 Genocide case. Thus, Dialita's work serves as a reminder of the importance of listening to the voices of victims to achieve historical justice and reconciliation.
Keyword: Dialita Choir, Subaltern, Post-colonial, 1965 Genocide, Collective Memory, Music as Resistance, Human Rights, Gayatri Spivak.

A. Pendahuluan

Dialita— merupakan akronim dari “Di Atas Lima Puluh Tahun”—adalah kelompok paduan suara yang beranggotakan para ibu-ibu penyintas Genosida 1965. Gerakan akar rumput ini terdiri dari (1) Para eks-tapol (tahanan politik) yang dipenjarakan karena keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI); (2) anggota keluarga para simpatisan PKI yang terbunuh atau terpenjara, dan (3) para pendukung yang menggunakan musik untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya mengusut tuntas genosida 1965. (Weintraub, 2021, hlm. 4).

Paduan Suara Dialita bermula dari Komunitas Ibu Peduli Anak. Mulanya Dialita dibentuk sebagai upaya membantu para eks-tapol 1965 yang mengalami kesulitan perekonomian. Mereka melakukan berbagai upaya ekonomi seperti berjualan barang-barang bekas yang masih layak digunakan. Sebelumnya Dialita berangkat dari sebuah kolektif di mana para perempuan penyintas 1965 bisa saling bercerita, dan bertukar pikiran. Kolektif ini terbentuk secara alami karena kesamaan nasib: sebagai eks-tapol 1965 mereka kerap mendapat diskriminasi dan kesulitan memperoleh pekerjaan, dan mereka merasa nyaman saling bercerita antarsesama eks-tapol. Pada akhirnya Dialita memutuskan membentuk sebuah paduan suara yang

kemudian mulai pentas di berbagai kesempatan untuk mengumpulkan dana yang bisa digunakan membantu perekonomian para personelnnya, dan para eks-tapol 1965 lainnya. (Triningsih dkk., 2020, hlm. 16–17).

Dialita belum begitu dikenal saat memulai kelompok paduan suara ini, dan mereka sering merasa kurang percaya diri karena khawatir musik mereka tidak sesuai dengan selera anak muda. Salah satu upaya mereka untuk memperkenalkan paduan suara ini ke masyarakat luas adalah melalui organisasi yang mereka ikuti serta jaringan sosial mereka. Anggota Dialita, memanfaatkan aktivitas mereka sebagai aktivis dalam organisasi—yang telah mereka geluti jauh sebelum Dialita terbentuk—untuk mengenalkan karya mereka kepada teman-teman di lingkungan tersebut. (Triningsih dkk., 2020, hlm. 17).

Nasib Dialita berubah dan menjadi semakin dikenal setelah merilis album pertama mereka *Dunia Milik Kita* pada 2016. Album ini dirilis secara gratis dengan lisensi *creative commons*, artinya lagu ini bebas diunduh dan disebarkan selama tidak untuk tujuan komersial. *Dunia Milik Kita* dirilis dan bebas diunduh di YesNoWave (album Dunia miik Kita dapat diunduh bebas di laman <https://yesnowave.com/releases/yesno083/>, sebuah *net-label* yang bermarkas di Yogyakarta.

Pada 1 Oktober 2016 Paduan Suara Dialita melakukan pertunjukan dalam rangka *launching* album *Dunia Milik Kita*. Konser tersebut digelar di Beringin Soekarno, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Tercatat bahwa ada lebih kurang 400an penonton yang hadir ke pertunjukan malam itu, dan sebagian besar adalah anak muda. (I. Saraswati, 2016). Para penonton yang sebagian besar adalah anak muda ini menjadi penting karena selaras dengan misi Paduan Suara Dialita: menyebarkan pesan tentang genosida 1965 agar lebih diketahui banyak orang, terutama anak muda. Para personel Paduan Suara Dialita punya harapan besar musik mereka menggaung lebih luas, dan agar generasi muda tidak lupa bahwa pada 1965 terjadi tragedi kemanusiaan yang sangat besar berupa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara. Pascamerilis album *Dunia Milik Kita* dan melakukan konser *launching* pada 2016, nama Paduan Suara Dialita makin santer terdengar. Mereka jadi kerap diundang untuk bermain di berbagai acara-acara kesenian dan kebudayaan. Bahkan kemudian Paduan Suara Dialita merilis album keduanya bertajuk *Salam Harapan* pada 2019.

Secara personal, penulis punya kedekatan karena penulis menggemari Paduan Suara Dialita dan dua album yang telah mereka rilis, *Dunia Milik Kita* (2016), dan *Salam Harapan*

(2019). Pada 1 Oktober 2016, penulis menjadi salah satu dari ratusan penonton yang hadir pada acara peluncuran (*launching*) album pertama Dialita, *Dunia Milik Kita* yang dihelat di Kompleks Beringin Soekarno, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kala itu penulis terpujuk oleh elan vital para personel Dialita. Mereka yang telah berusia senja, tetapi memiliki semangat yang luar biasa untuk menyebarkan pesan tentang genosida 1965 kepada para penonton yang kebanyakan adalah anak muda. penulis juga memiliki kedekatan personal dengan para musisi muda yang didaulat menjadi kolaborator untuk karya-karya Dialita, seperti Leilani Hermiasih (frau), Cholil Mahmud, dan Erie Setiawan selaku *frontman* dari grup Keroncongan Agawe Santosa. Pascakonser, penulis mulai mendalami kisah hidup para personel Paduan Suara Dialita, dan kerap memutar lagu-lagu milik Dialita. Penulis bahkan sempat menuliskan kisah Dialita di rubrik *akademia The Jakarta Post*. (Setyawan, 2022).

Kedekatan personal sebagai seorang penggemar ini yang menjadikan penulis memutuskan untuk menulis tentang Paduan Suara Dialita.

Persoalan yang coba penulis jawab cukup kompleks. Ini karena eksistensi Paduan Suara Dialita berkelindan erat dengan sebuah kekerasan masif yang dilakukan negara pada

periode 1965. Penulis memilih tema ini untuk ditulis karena sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri telah mengakui bahwa genosida 1965 adalah satu dari 12 pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ketika masih menjabat sebagai presiden, pada 11 Januari 2023 Joko Widodo menyatakan bahwa genosida 1965 adalah pelanggaran HAM berat di mana mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat di Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap, disiksa, hingga dieksekusi tanpa proses hukum. Lebih kurang 500,000 hingga tiga juta orang meninggal dunia dalam genosida 1965 ini. (*Presiden Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, 2023).

Namun, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada tanda-tanda keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas genosida 1965. Tidak ada proses hukum yang berlanjut mengusut siapa dalang utama kejadian genosida 1965, tidak ada upaya memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun kepada para penyintas, bahkan hingga sekarang pembicaraan mengenai ideologi-ideologi berhaluan kiri seperti marxisme dan komunisme masih saja dilarang dan dianggap tabu. Ini karena Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 yang masih aktif sampai sekarang dan tidak diamendemen. Isi dari ketetapan tersebut adalah “Pembubaran Partai Komunis

Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/marxisme-leninisme”. (Online, t.t.).

Persoalan yang mencoba penulis jawab adalah bagaimana Paduan Suara Dialita, para penyintas genosida 1965 yang direpresi oleh negara, yang telah eksis sejak 2011 santer menggunakan musik sebagai medium penyampaian pesan tentang genosida 1965, bahkan menuntut agar ada ketegasan pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini. Namun, suara mereka tidak pernah didengarkan. Paduan Suara Dialita adalah kelompok Subaltern yang bisa berbicara tetapi tidak didengarkan.

B. Metode Penelitian

Teori yang penulis coba gunakan untuk mengurai persoalan yang telah disebutkan di atas adalah Subaltern, terutama dari pemikir dan tokoh kajian Pascakolonial asal India, Gayatri Chakravorty Spivak. Latar belakang gagasan Spivak adalah pengalaman dan sejarah individu dan kelompok sosial tertentu, yang secara historis telah dirampas dan dieksploitasi oleh kolonialisme Eropa. Subaltern hadir untuk mencakup berbagai jenis subjek yang berbeda yang tidak

terjangkau oleh wacana politik yang dominan. Subaltern juga dapat mengakomodasi identitas dan perjuangan sosial (seperti perempuan dan kaum terjajah) yang tidak termasuk dalam istilah restriktif 'analisis kelas yang ketat'. (Morton, 2003, hlm. 46).

Dalam penelitian awal Kajian Subaltern, Spivak menolak gagasan bahwa subaltern adalah subjek politik yang mandiri dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Ia dengan tegas menentang pandangan tersebut, dengan alasan bahwa konsep subaltern sebagai subjek yang berdaulat sebenarnya merupakan hasil konstruksi wacana dominan dari kaum elite. Menurut Spivak, kemampuan politik subaltern dibentuk oleh wacana dominan yang muncul sebagai kelanjutan dari nasionalisme elite. Wacana ini memasukkan subaltern ke dalam narasi besar perjuangan kemerdekaan kaum borjuis, sambil mengabaikan perjuangan lokal yang unik dari kelompok-kelompok subaltern tertentu.

Spivak membandingkan klaim radikal intelektual Prancis abad ke-20 seperti Michel Foucault dan Gilles Deleuze, yang berusaha mewakili kelompok-kelompok yang hak-haknya dirampas, dengan klaim moral kolonialisme Inggris di abad ke-19 untuk menyelamatkan perempuan pribumi dari praktik sati, yaitu pengorbanan janda Hindu di India.

Foucault dan Deleuze menganggap diri mereka mampu berbicara atas nama kelompok-kelompok tertindas atau yang “tidak memiliki suara.” Meskipun mereka mengkritik berbagai bentuk kekuasaan dan berupaya membongkar bagaimana struktur kekuasaan menindas, mereka sering mengabaikan fakta bahwa kelompok-kelompok tertindas mungkin memiliki konteks dan cara tersendiri dalam mengungkapkan pengalaman dan perjuangan mereka. Spivak mengkritik pendekatan ini karena alih-alih memberi ruang bagi suara kelompok subaltern, mereka justru memperkuat dominasi dengan mengarahkan wacana sesuai perspektif mereka sendiri. (Morris, 2010).

Secara lebih sederhana dan ringkas, Spivak menolak hegemoni para pemikir besar yang beranggapan bahwa mereka punya hak dan kewajiban untuk berbicara mewakili kaum subaltern. Padahal Spivak menekankan bahwa kaum Subaltern memiliki suaranya sendiri. Esai termasyhur Spivak *Can the Subaltern Speak?* (1988) kerap salah dipahami dengan definisi “kaum subaltern tidak dapat berbicara, maka mereka harus diwakili oleh kaum intelektual ketika ingin bersuara”. Padahal, dalam pembacaan penulis, maksud dari Spivak lebih tepatnya adalah “*Can the subaltern be heard?*” Bahwa kaum Subaltern sesungguhnya bisa berbicara sendiri tentang berbagai isu dan

masalah yang mereka hadapi. Pertanyaannya adalah: apakah kita mau mendengarkan ketika mereka berbicara?

Data yang penulis pakai untuk menyusun tulisan ini adalah berupa data teks yang diperoleh dari kajian pustaka atau literatur. Di sini penulis mengumpulkan kajian-kajian terdahulu yang pernah membahas Paduan Suara Dialita. Namun, sayangnya masih sangat sedikit akademisi yang menulis tentang Paduan Suara Dialita. Mengenai metode pencarian data, penulis melakukan penelusuran mendalam ke berbagai *repository* dari beberapa kampus. Misalnya dari Universitas Sanata Dharma, dan Universitas Gadjah Mada. Dari hasil penelusuran tersebut penulis hanya menemukan satu buah karya ilmiah yang membahas Paduan Suara Dialita. Karya tersebut berupa skripsi Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada yang ditulis oleh Faida Nur Rahmawati dan bertajuk *Menuliskan Ingatan, Menghidupkan Arsip, dan Menyanyikan Sejarah (Studi Kasus Proses Produksi Album Dialita: Dunia Milik Kita Sebagai Medium Pembentukan Wacana terhadap Identitas Eks-Tahanan Politik dan Narasi Sejarah Pasca 1965*.

Penulis juga melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan piranti lunak Publish or Perish untuk menelusuri berbagai indeks jurnal ternama

seperti Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Hasilnya, penulis menemukan tujuh artikel (*paper*) jurnal yang membahas Paduan Suara Dialita. Lebih lanjut penulis menelusuri internet untuk mencari tulisan, berita, *feature*, atau esai yang membahas tentang Paduan Suara Dialita, dan menemukan empat tulisan di media massa yang membahas Paduan Suara Dialita. Setelah mengumpulkan data-data dengan metode pencarian yang telah dijelaskan, penulis kemudian mulai membaca dengan saksama seluruh literatur tersebut untuk menemukan data-data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun tulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Temuan dari data-data yang telah terkumpul cukup menarik. *Pertama*, Dari skripsi Faida Nur Rachmawati penulis menemukan bahwa album pertama Paduan Suara Dialita, *Dunia Milik Kita* berhasil menyasar audiens yang memang disasar oleh Paduan Suara Dialita, yaitu para generasi muda (anak muda). Album ini berhasil membuat para anak muda lebih melek dengan isu genosida 1965. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah pengunduh album *Dunia Milik Kita* di situs web YesNoWave. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadikan album ini sukses dan didengarkan banyak orang. *Pertama*,

penggunaan kuasa dalam skala yang cukup terkait dengan pengaruh tim produksi dalam proses pembentukan dan distribusi wacana. *Kedua*, kuatnya profil Dialita sebagai paduan suara penyintas 1965 sebagai identitas kolektif. *Ketiga*, pendekatan populer yang dilakukan tim produksi dan kolaborator untuk ‘menghidupkan’ arsip yang dimiliki oleh Dialita. (Rachmawati, 2018, hlm. vi–vii).

Keberhasilan Paduan Suara Dialita menyerukan isu genosida 1965 ke generasi muda juga dapat ditemukan dalam karya jurnalistik berbentuk *in-depth feature* karya Sylvie Tanaga yang bertajuk *Kabut Putih: Senandung Harapan dari Tanah Pengasingan*. Di dalam tulisannya Sylvie menjelaskan bagaimana dua musisi generasi muda yaitu frau (Leilani Hermiasih) dan hara (Rara Sekar) berkolaborasi mengaransemen ulang dan membawakan ulang salah satu lagu Paduan Suara Dialita yang berjudul “Kabut Putih”. (Tanaga, 2024).

Temuan berikutnya berasal dari artikel jurnal bertajuk *Bentuk perlawanan perempuan melalui penulisan dalam album Dunia Milik Kita dan Salam Harapan* karya Dyah Paramita Saraswati. Melalui penelitian ini menjadi jelas bahwa lagu yang ditulis oleh para tahanan politik perempuan dalam penjara—dalam hal ini Paduan Suara Dialita—banyak menggunakan pemilihan kata yang

menggambarkan kekuatan dan harapan. Lirik dari lagu tersebut tidak ditulis dengan baris panjang dan banyak bait, sebaliknya, lirik tersebut terbilang sederhana dan gamblang meski banyak menggunakan pengandaian, misalnya “pagi”, “batu karang”, ataupun “bunga mawar”. Oleh karena itu, lirik dari lagu yang ditulis oleh Paduan Suara Dialita memiliki karakteristik yang terbilang mirip dengan puisi. (D. P. Saraswati dkk., 2022, hlm. 92).

Dyah Pitaloka dan Mohan J. Dutta juga menuliskan dalam artikel jurnalnya bahwa Paduan Suara Dialita bukan lagi hanya sekadar sebuah paduan suara atau *choir*. Paduan Suara Dialita telah malih rupa menjadi sebuah gerakan. (Pitaloka & Dutta, 2024, hlm. 226).

Untuk menganalisis eksistensi Paduan Suara Dialita dan genosida 1965 dari perspektif Pascakolonial, penulis akan menggunakan gagasan Subaltern yang dipaparkan oleh Spivak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Spivak mengkritisi pemikir besar seperti Foucault dan Deleuze yang beranggapan bahwa sebagai kaum intelektual, mereka memiliki kewajiban bersuara atau menjadi corong bagi kaum Subaltern. Padahal Spivak berargumen bahwa kaum Subaltern bisa bersuara sendiri, dan memiliki cara bergerak di ranah praksis tersendiri.

Hal serupa terjadi dalam Dialita. Di dalam pembacaan penulis, Paduan Suara Dialita bisa tergolong sebagai kaum Subaltern. Mereka terpinggirkan, tertindas, dan menjadi korban represi dari Negara (baca: kekuasaan) yang otoriter sejak 1965 hingga masa-masa awal reformasi ketika rezim Orde Baru akhirnya runtuh. Faktanya, Paduan Suara Dialita memang mampu bersuara sendiri, melalui medium nyanyian atau musik. Melalui musik, Dialita menyuarakan *concern* mereka tentang bagaimana Negara harus bertanggungjawab menuntaskan kasus genosida 1965, bagaimana mereka sebagai penyintas adalah korban yang merana karena dipenjara tanpa pengadilan hanya karena mereka adalah simpatisan PKI, atau bahkan sekadar anggota keluarga PKI. Paduan Suara Dialita memiliki sendiri suara mereka, pandangan politik mereka, dan sikap yang sangat khas Subaltern. Sebagai kaum Subaltern, Paduan Suara Dialita memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak harus selalu menjadi objek bagi kaum intelektual yang mengaku berupaya membela kaum tertindas tetapi sebenarnya justru sedang melanggengkan kolonialisme dan penjajahan baik secara politik maupun kultural.

Berikutnya, tentang argumen termasyhur Gayatri Spivak “*Can the Subaltern Speak?*” yang kerap disalahartikan sebagai “apakah kaum

Subaltern bisa berbicara?”. Yang lebih tepatnya adalah “*Can the Subaltern be heard?*”. Bahwa kaum Subaltern sebenarnya bisa bersuara sendiri, berbicara sendiri. Namun, sayangnya mereka kerap tidak didengarkan. Kaum Subaltern kerap dianggap *insignificant* dalam peradaban manusia.

Di dalam kasus Paduan Suara Dialita, dari hasil temuan yang telah dipaparkan, tampak bahwa Paduan Suara Dialita bisa bersuara/berbicara sendiri tentang permasalahan yang mereka hadapi sebagai eks-tapol sesuai dengan konteks mereka sendiri. Namun, suara dan pembicaraan yang mewujud dalam nyanyian dan musik itu hanya didengarkan oleh anak-anak muda, generasi yang memiliki privilese berupa akses ke ilmu pengetahuan, sekaligus tingkat pendidikan yang cukup baik sehingga mereka secara sadar mau peduli dengan isu-isu kemanusiaan seperti nasib para ibu-ibu penyintas genosida 1965 di Paduan Suara Dialita, serta bagaimana genosida 1965 adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Anak-anak muda ini misalnya adalah 400an orang yang hadir saat konser peluncuran album *Dunia Milik Kita* diadakan pada 2016 silam, atau frau dan hara sebagai musisi dari kalangan muda yang mau menyanyikan lagu Dialita.

Namun, pemerintah dan kuasa (baca: Negara) tidak mau mendengarkan nyanyian

Paduan Suara Dialita. Terbukti bahwa sejak terbentuk pada 2011 silam hingga sekarang, sudah tidak terhitung berapa kali Paduan Suara Dialita naik panggung di berbagai acara, bahkan terkadang di acara yang diselenggarakan institusi negara. Musik Dialita juga mudah diakses siapa saja di seluruh *platform streaming* musik seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube, atau bisa diunduh gratis di situs web YesNoWave. Padahal lirik lagu mereka secara gamblang menggambarkan pesan-pesan penting: penggugatan agar genosida 1965 diusut tuntas, pengembalian hak-hak para personel Dialita—dan penyintas 1965 lainnya—baik berupa rasa aman untuk hidup di Indonesia, hak ekonomi, hingga hak yang bersifat non-benda seperti permintaan maaf negara terhadap mereka.

Namun, hingga tulisan ini selesai ditulis, Negara belum juga melakukan aksi nyata misalnya membentuk komisi khusus yang bertugas mengusut tuntas genosida 1965 untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia tersebut. Tidak juga ada tanda-tanda bahwa Negara akan memberikan kompensasi rupiah kepada para personel Paduan Suara Dialita sebagai bentuk permintaan maaf karena Negara di masa lampau telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap ibu-ibu penyintas ini.

Jika tujuan utama disiplin Pascakolonial adalah melucuti kuasa kolonialisme, dan mengembalikan harkat dan martabat kelompok/bangsa/kolektif/personal yang pernah terjajah, Paduan Suara Dialita sebagai kelompok Subaltern telah melakukan upaya bersuara tentang nasib mereka sesuai dengan konteks mereka sendiri, bahwa mereka pernah terjajah, dan masih terjajah karena suara mereka tidak didengarkan oleh kolonialisme modern (baca: Negara). Pertanyaannya kemudian adalah: apakah kaum intelektual—termasuk penulis sendiri—mau membantu Paduan Suara Dialita mengamplifikasi suara-suara mereka? Dan tidak terjebak menjadi kaum pemikir yang merasa punya hak sekadar menjadi perpanjangan tangan mereka? Karena sejarah sudah membuktikan bahwa setelah 13 tahun lamanya, ibu-ibu berusia senja di Paduan Suara Dialita masih terseok-seok dalam menuntut haknya sebagai warga Negara. Maka, sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu agar warga Indonesia (termasuk Negara) mau mendengarkan suara Subaltern, dalam hal ini Paduan Suara Dialita, dan Nyanyian Dialita harus didengarkan. Tentu saja dengan mengikuti cara dan konteks yang Dialita inginkan agar kita tak terjebak dalam lingkaran setan laku objektifikasi persis yang dilakukan Foucault dan Deleuze di masa lampau.

D. Simpulan

Tulisan ini menyoroti peran penting Paduan Suara Dialita dalam mengartikulasikan pengalaman dan perjuangan penyintas genosida 1965 melalui medium musik. Sebagai kelompok Subaltern dalam konteks teori Gayatri Spivak, Dialita berhasil memanfaatkan suara mereka sendiri untuk menyampaikan narasi yang selama ini diabaikan oleh wacana dominan negara. Musik mereka tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga alat untuk menyadarkan generasi muda tentang tragedi kemanusiaan yang telah lama dilupakan.

Di dalam kerangka kajian, Paduan Suara Dialita menunjukkan bagaimana kelompok yang terpinggirkan dapat memproduksi wacana alternatif yang menantang narasi hegemonik. Namun, sebagaimana Spivak soroti dalam “*Can the Subaltern Speak?*”, meskipun Dialita mampu berbicara, tantangannya adalah apakah suara mereka benar-benar didengar oleh pihak-pihak berkuasa? Hingga saat ini, negara belum memberikan respons nyata terhadap tuntutan mereka untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat pada 1965, memperlihatkan bagaimana kolonialisme dalam bentuk baru—yaitu represi oleh negara—tetap berlangsung.

Paduan Suara Dialita juga merepresentasikan resistensi melalui bentuk

seni yang menyentuh, seperti terlihat dalam album *Dunia Milik Kita* dan *Salam Harapan*. Kolaborasi mereka dengan musisi muda menunjukkan strategi untuk menjembatani generasi dan memperluas jangkauan pesan mereka. Musik Dialita menjadi ruang interaksi antara sejarah, trauma, dan harapan, yang tidak hanya menyuarakan kebenaran, tetapi juga menantang lupa kolektif bangsa.

Di tulisan ini penulis menegaskan pentingnya mendengarkan suara subaltern seperti Dialita, tidak hanya sebagai upaya memahami sejarah dari perspektif korban, tetapi juga sebagai langkah memperjuangkan keadilan dan rekonsiliasi. Sebagai mahasiswa Kajian Budaya, ini menjadi pengingat untuk penulis bahwa tugas intelektual bukan hanya mengamplifikasi suara-suara tersebut, tetapi juga menghormati konteks, agensi, dan narasi mereka tanpa mendominasi. Nyanyian Dialita, sebagai suara keberanian dan keteguhan, harus terus didengarkan, terutama oleh generasi muda dan pengambil kebijakan, untuk memastikan tragedi serupa tidak akan pernah terulang lagi.

E. Daftar Pustaka

- Morris, R. C. (Ed.). (2010). *Can the subaltern speak? Reflections on the history of an idea*. Columbia Univ. Press.
- Morton, S. (2003). *Gayatri Chakravorty Spivak*. Routledge.

- Online, H. (t.t.). *Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966—Pusat Data Hukumonline*. hukumonline.com. Diambil 11 Desember 2024, dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50768a41ad5ab/ketetapan-mprs-nomor-xxv-mprs-1966-tahun-1966/document/>
- Pitaloka, D., & Dutta, M. J. (2024). Performing Songs As Healing The Trauma of The 1965 Anti-Communist Killings in Indonesia. Dalam M. S. Picale & H. Pols (Ed.), *Traumatic pasts in Asia: History, psychiatry, and trauma from the 1930s to the present* (First paperback edition). Berghahn.
- Presiden Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. (2023, Januari 11). Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. <https://historia.id/politik/articles/presiden-jokowi-akui-12-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-v29V3>
- Rachmawati, F. N. (2018). *Menuliskan Ingatan, Menghidupkan Arsip, dan Menyanyikan Sejarah (Studi Kasus Proses Produksi Album Dialita: Dunia Milik Kita Sebagai Medium Pembentukan Wacana terhadap Identitas Eks-Tahanan Politik dan Narasi Sejarah Pasca 1965)* [Undergraduate Thesis, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/153920
- Saraswati, D. P., Subono, N. I., & Melani, F. (2022). Bentuk perlawanan perempuan melalui penulisan dalam album Dunia Milik Kita dan Salam Harapan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 26(2), 89–104.
- <https://doi.org/10.21831/hum.v26i2.45473>
- Saraswati, I. (2016, Oktober 19). *Paduan Suara Dialita: Mewujudkan Dunia Milik Kita*. Serunai.co. <https://serunai.co/2016/10/20/paduan-suara-dialita-mewujudkan-dunia-milik-kita/>
- Setyawan, A. (2022). *Dialita Choir and the struggle to fight the nation's amnesia—Academia*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/07/22/dialita-choir-and-the-struggle-to-fight-the-nations-amnesia.html>
- Tanaga, S. (2024, Oktober 24). *Kabut Putih: Senandung Harapan dari Tanah Pengasingan*. Serunai.co. <https://serunai.co/2024/10/24/kabut-putih-senandung-harapan-dari-tanah-pengasingan/>
- Triningsih, W., Martini, S., & Abrar. (2020). Senandung Pilu Eks Tahanan Politik 1965: Sejarah Paduan Suara Dialita (2011-2016). *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 2(1).
- Weintraub, A. N. (2021). The Act of Singing: Women, Music, and the Politics of Truth and Reconciliation in Indonesia. *Yearbook for Traditional Music*, 53. https://www.cambridge.org/core/journals/yearbook-for-traditional-music/article/abs/act-of-singing-women-music-and-the-politics-of-truth-and-reconciliation-in-indonesia/94D6B755BB6399D24C64D3E93AD9E3C2?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark

